

Analisis Kewarganegaraan Global dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan

Rianda Usmi

Universitas Pendidikan Indonesia, riandausmiS3@upi.edu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep atau makna kewarganegaraan global ditinjau dari berbagai pandangan ideologi dunia, dan meguraikan kewarganegaraan global dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap konsep kewarganegaraan global dewasa ini masih kabur dan belum terdapat definisi tetap yang disepakati. Faktor penyebabnya adalah karena perbedaan pandangan dari para ilmuan-ilmuan pendidikan (moralitas) dan sosial-politik yang masing-masing mengklaim kewarganegaraan global sebagai bagian kajian bidangnya, serta perbedaan pemaknaan dari ideologi-ideologi dunia. Kajian kewarganegaraan global dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan telah menjadi daya tarik yang kuat dalam studi pendidikan kewarganegaraan di berbagai negara. Hal ini terlihat dari topik-topik kewarganegaraan global yang telah dikembangkan dalam konten Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya topik yang berhubungan dengan hak asasi manusia, globalisasi, dan perdamaian dunia.

Kata Kunci: kewarganegaraan global, pendidikan kewarganegaraan, globalisasi.

Abstract

This study aims to analyze the concept or meaning of global citizenship in terms of various world ideological views, and to describe global citizenship in the context of Civic Education. This research uses a qualitative descriptive approach with a literature study method. The results of the study show that the meaning of the concept of global citizenship today is still unclear and there is no fixed definition that has been agreed upon. The causative factor is due to the different views of educational (morality) and socio-political scientists who each claim global citizenship as part of their field of study, as well as differences in the meanings of world ideologies. The study of global citizenship in the context of civic education has become a strong attraction in civic education studies in various countries. This can be seen from the global citizenship topics that have been developed in civic education content, especially topics related to human rights, globalization and world peace.

Keywords: global citizenship, civic education, globalization

PENDAHULUAN

Globalisasi adalah tatanan kehidupan yang mendunia. Globalisasi melintasi batas-batas wilayah suatu negara atau bahkan dapat dikatakan tidak mengenal batas-batas wilayah, sehingga batas wilayah antar negara menjadi semakin kabur. Giddens (1999: 4) mengatakan bahwa proses globalisasi adalah proses yang melampaui batas ruang dan waktu. Menurut Murdiono (2018: 42) globalisasi adalah proses dibentuknya suatu tatanan, aturan, dan sistem yang berlaku bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Terjadinya globalisasi setidaknya disebabkan oleh empat faktor utama menurut Scholte (Ampuja, 2011: 284) antara lain (1) meluasnya rasionalisme sebagai kerangka pengetahuan yang dominan; (2) berkembangnya kapitalisme; (3) inovasi teknologi; (4) perubahan regulasi internasional. Implikasi dari setidaknya empat faktor ini mengakibatkan proses

globalisasi terjadi hampir di seluruh bidang kehidupan manusia baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kewarganegaraan

Di era modern dewasa ini, perkembangan globalisasi telah mempengaruhi konsepsi kewarganegaraan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Murdiono (2018: 21) bahwa kajian tentang kewarganegaraan menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan di berbagai belahan dunia seiring dengan berkembangnya globalisasi. Tekanan globalisasi dalam beberapa waktu belakangan ini menjadikan konsep kewarganegaraan semakin dilihat dalam istilah global yang dipengaruhi oleh isu dan masalah global seperti migrasi transnasional, homogenisasi praktik-praktik budaya dan pengembangan pengelompokan supranasional (Kennedy, 2012: 121). Kemudian diperkuat dengan pernyataan Beiner (1999) bahwa pada era modern-kontemporer kajian tentang kewarganegaraan semakin banyak diminati, karena

konsep kewarganegaraan menjadi salah satu masalah teoretis di abad ke-20 di tengah persoalan kewarganegaraan yang semakin kompleks dan problematis, sehingga banyak para akademisi ataupun ahli teori yang mengkaji dan menaruh perhatian baru pada konsep kewarganegaraan.

Dalam konteks kewarganegaraan, globalisasi membuat setiap warga negara menjadi tanpa batas sehingga memunculkan konsep warga negara global (kewarganegaraan global). Tren kewarganegaraan global sesungguhnya bukanlah sebuah konsep yang baru. Secara historis, konsep kewarganegaraan global telah muncul sejak zaman Yunani kuno, yaitu dalam ajaran kaum Stoa-Stoicism (Manisha, 2018: 542-543). Terdapat enam ajaran dasar Old Stoa-Stoicism kuno menurut Heater (Sukmayadi, 2022: 181-182), yaitu: (1) adanya gagasan mengenai pentingnya kesatuan global, yang artinya bahwa semua orang apa pun perbedaannya, baik suku, agama, maupun budaya merupakan satu jenis yang hidup sebagai satu komunitas dunia, yang disebut *the oikumene*; (2) gagasan dari logos, yang merupakan kombinasi antara apa yang dikatakan dan apa yang dipahami yang tercermin dalam perkataan dan pikiran rasional; (3) adanya hukum universal, bahwa seluruh hukum manusia dipelihara oleh satu hukum, yaitu hukum yang berasal dari tuhan; (4) hukum universal disampaikan oleh Tuhan, bahwa Tuhan merupakan bagian dari alam semesta, sementara manusia dianugerahi pengetahuan supaya dapat mengetahuinya; (5) hanya mereka yang bijaklah yang dapat dipandang sebagai warga; (6) hanya mereka yang bijaklah yang dapat menggunakan kapasitas kerasionalan mereka untuk dapat hidup dalam ketenteraman. Berdasarkan enam ajaran dasar Old Stoa-Stoicism tersebut terlihat eksistensi kewarganegaraan global termuat dalam konsep dasar yang pertama, yaitu pentingnya kesatuan global.

Adapun dalam tinjauan kontemporer, kewarganegaraan global sebagai konsep muncul pada tahun 1990-an terutama dalam bidang pendidikan. Kemunculan kembali konsep kewarganegaraan global dilatarbelakangi oleh dunia yang telah menjadi sistem global yang melahirkan keterikatan-keterikatan atau ketergantungan antar bangsa-bangsa. Sebagaimana yang diungkapkan Manisha (2018: 543) bahwa pada tahun 1990-an di era millennium baru konsep kewarganegaraan global sekali lagi telah menarik perhatian karena beberapa transformasi kontemporer yang sedang berlangsung. Di sisi lain, isu dan masalah-masalah global semakin tak terhindarkan, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan tantangan transnasional misalnya migrasi, perubahan iklim, xenophobia, rasisme, radikalisme, dan ekstremisme (Franch, 2019: 1-2). Dinamika dan realitas dunia yang semakin kompleks dan berkembang pesat tersebut telah menguatkan kembali konsep kewarganegaraan global.

Sebagaimana yang diungkapkan Franch (2019: 1) bahwa dalam perkembangan dunia abad 21 telah muncul ketertarikan baru dalam gagasan global, yaitu “kewarganegaraan global”.

Menurut Ross dan Davies (2018: 29-30) terdapat empat tren kemunculan kewarganegaraan global di abad kontemporer. Pertama, pembangunan kewarganegaraan, yaitu upaya mengatasi kemiskinan global, ketidaksetaraan global, serta isu-isu pembangunan berkelanjutan. Kedua, masalah lingkungan global, yang mana muncul keberpihakan pada ekologis, termasuk keadilan ekologis. Ketiga, identitas global, yang mana aspek-aspek identitas kewarganegaraan saat ini telah menjadi beragam. Keempat, Hak Asasi Manusia Universal, yang mana dewasa ini hak asasi merupakan sebuah konsepsi kewarganegaraan global. Eksistensi selanjutnya dari kewarganegaraan global semakin diperkuat dengan hasil evaluasi UNESCO pada kebijakan 1990-2015 atas gagasan pendidikan untuk semua yang memunculkan konsep kewarganegaraan global sebagai kebijakan baru, tuntutan baru, dan keberlanjutan dari tuntutan konsep lama yaitu pembangunan berkelanjutan dan pendidikan perdamaian (UNESCO, 2015: 14). Kewarganegaraan global dimunculkan sebagai gerakan dari orang-orang yang terhubung dalam keterlibatan secara lintas batas untuk perjuangan solidaritas, yaitu bagaimana kontribusi kewarganegaraan global terhadap pendidikan dan kesetaraan di seluruh dunia (Shultz, 2018: 246).

Tren kemunculan kewarganegaraan global selanjutnya berkembang menjadi topik yang menarik dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Di samping sebagai kajian yang mutakhir, konsepsi kewarganegaraan global tentu memiliki implikasi dalam studi pendidikan kewarganegaraan di abad kontemporer. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Theresa (2015: 66) bahwa untuk mempersiapkan warga negara dalam menghadapi arus global yang tak dapat dihindari maka diperlukan penyesuaian, persiapan, dan pemahaman. Kemudian Theresa (2015: 66-67) mengemukakan sebuah gagasan mengenai kewarganegaraan global dengan memfokuskan pada kajian kewarganegaraan yang selanjutnya disesuaikan dengan keadaan dunia internasional. Tulisan ini kemudian bertujuan untuk mengkaji konsepsi sekaligus mendalami hakikat atau pemaknaan dari kewarganegaraan global, serta melakukan penelusuran mendalam berkaitan dengan kewarganegaraan global dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Kebaruan pada penelitian ini adalah kajian kewarganegaraan global yang ditinjau dari beberapa ideologi-ideologi utama di dunia, seperti globalisme, kosmopolitanisme, transnasionalisme, internasionalisme, nasionalisme, post-kolonialisme, dan indegenisme. Pada bahasan pertama, penulis akan mengawali dengan tinjauan

konseptual/hakikat kewarganegaraan global, termasuk konsep kewarganegaraan global dalam pandangan ideologi-ideologi utama. Kemudian, pada bagian kedua sekaligus terakhir penulis akan mengulas tentang kewarganegaraan global dalam konteks pendidikan kewarganegaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur. Sumber data berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan kewarganegaraan global dan Pendidikan Kewarganegaraan. Prosedur meta analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data pustaka, membuat catatan, dan mereview sumber data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan peninjauan, setelah itu dilakukan analisis dengan teknik analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendefinisikan Kewarganegaraan Global

Studi UNESCO (2015: 14) mendefinisikan kewarganegaraan global sebagai konsep yang mengacu pada perasaan memiliki komunitas yang lebih luas dan kemanusiaan yang sama. Perspektif ini pada hakikatnya menekankan saling ketergantungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dan keterkaitan antara lokal, nasional dan global, sehingga melahirkan perasaan akan memiliki komunitas yang lebih luas (Cotton, Morrison, Magne et al, 2019). Meskipun konsep kewarganegaraan global telah menjadi topik yang menarik untuk didiskusikan di berbagai belahan dunia seiring dengan berkembangnya globalisasi, namun sejatinya konsep kewarganegaraan global masih “kabur atau belum jelas”. Sebagaimana pernyataan dari UNESCO (2015: 14) bahwa pendukung pendidikan untuk kewarganegaraan global mengakui belum ada definisi khusus yang disepakati untuk kewarganegaraan global, melainkan hanya digambarkan sebagai etos atau metafora, bukan keanggotaan formal. Terlebih menurut Franch (2019: 2) dewasa ini masih sulit dalam mengkonseptualisasi kewarganegaraan global. Hal ini dikarenakan perbedaan pandangan para ilmuwan-ilmuan pendidikan (moralitas) dan sosial-politik yang masih melahirkan perdebatan-perdebatan. Para ilmuwan dengan perspektif moral memandang bahwa kewarganegaraan global diperlukan untuk melembagakan komitmen moral/etika yang lebih luas (universalitas) dan mendemokratisasikan institusi tata kelola global. Sedangkan ilmuwan dengan pendekatan sosio-politik memandang bahwa kewarganegaraan global lebih dari sekedar etika atau keharusan moral, namun juga konseptualisasi politik, yang mengandung arti sebagai

istilah baru yang menantang keyakinan bahwa kewajiban utama seorang individu itu hanya untuk negarabangsanya.

Implikasi dari tidak adanya definisi yang disepakati atas konsep kewarganegaraan global, maka pemaknaan terhadap konsep kewarganegaraan global dewasa ini masih beragam. Menurut Dill dan Veugelers (Misco, 2018: 364) kewarganegaraan global adalah bentuk kewarganegaraan di mana proses globalisasi bersinggungan dengan hak asasi manusia, termasuk juga mencakup kewajiban utama, dan tanggungjawab atas dunia, serta merupakan upaya moral. Sementara Sarabhai (2013: 137) dan Gough (2018) mengaitkan kewarganegaraan global sebagai pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Adapun menurut Dower, Falk, Appiah (Manisha, 2018: 543) mengemukakan bahwa esensi kewarganegaraan global adalah menekankan keunggulan hak moral universal semua manusia, namun tidak berpandangan bahwa untuk menjadi warga global maka seseorang harus melepaskan kewarganegaraan nasional. Sedangkan Byers (Pike & Sillem, 2018: 573) memaknai kewarganegaraan global berarti memberdayakan individu manusia untuk berpartisipasi dalam keputusan mengenai kehidupan mereka, termasuk kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan di mana mereka tinggal. Hak ini juga mencakup hak untuk memilih, hak untuk menyatakan pendapat dan bergaul dengan orang lain, dan hak untuk menikmati kualitas hidup yang layak dan bermartabat. Hal ini diekspresikan melalui keterlibatan dalam berbagai komunitas di mana individu menjadi bagiannya, di tingkat lokal, nasional dan global, termasuk hak untuk menantang otoritas dan struktur kekuasaan yang ada dengan tujuan untuk mengubah dunia.

Berdasarkan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para pakar di atas, sederhananya hakikat dari kewarganegaraan global adalah kewarganegaraan yang melampaui batas-batas negara. Kemudian, dalam konteks saat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kewarganegaraan global dapat dipahami sebagai kewarganegaraan yang berpikiran/berorientasi global untuk ikut andil dan berperan aktif baik pada tingkat nasional maupun global dalam menghadapi dan menjawab berbagai tantangan dan permasalahan global, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, masalah lingkungan, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya, harapannya dapat membentuk warga global sebagai agen yang berkontribusi untuk menciptakan dunia yang damai, aman, adil, toleran, inklusif, dan berkelanjutan (Usmi dan Samsuri, 2022: 149). Oleh karena itu, hakikat dari kewarganegaraan global ialah warga negara yang mampu memberikan peran yang lebih luas yaitu melintasi batas-batas wilayah negaranya dalam aspek nilai-nilai kemanusiaan. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Falk (Manisha, 2018: 547) bahwa warga global memiliki kesetiaan pada nilai, bukan pada negara.

Selanjutnya, pemaknaan kewarganegaraan global dapat ditinjau dari berbagai pandangan ideologi dunia yang mempengaruhi makna/konsep maupun keberadaan kewarganegaraan global dalam kehidupan masyarakat dunia. Ideologi-ideologi ini terdiri dari globalisme, nasionalisme, internasionalisme, transnasionalisme, kosmopolitanisme pasca-kolonialisme, dan indigenisme. Setiap ideologi mempengaruhi makna dan keberadaan kewarganegaraan global sesuai dengan pendekatan dan penekanan masing-masing paham dan pemikirannya. **Pertama**, globalisme. Implikasi pandangan globalisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global ialah sebagai tuntutan bagi warga negara dunia untuk menjaga ruang keterbukaan, ruang partisipasi dalam masyarakat, mendorong agenda emansipatoris, perjuangan sosial dan transformasi masyarakat (Schreiber-Barsch, 2018: 124). Kemudian, implikasi untuk pendidikan bagi kewarganegaraan global meliputi empat aspek; 1) dampak politik global, seperti contohnya Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas menguatkan konsep hak asasi manusia; 2) membangun kesetaraan; 3) menentukan kerangka kerja global maupun lokal terkait dengan partisipasi yang diharapkan dan dengan cara apa akses untuk terlibat dapat diberikan; 4) menekankan kekuatan transformatif untuk diakui sebagai warga negara di ruang publik (Schreiber-Barsch, 2018: 124-126).

Kedua, ideologi nasionalisme. Menurut Kymlicka (2002: 222) nasionalisme merupakan gerakan-gerakan politik dan kebijakan publik yang memandang bahwa negara-negara merupakan “negara-bangsa” di mana negara dan bangsa itu terjadi pada waktu yang sama/bersamaan. Implikasi pandangan nasionalisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global ialah warga negara dunia harus memberikan kesetiaan bukan hanya pada bentuk pemerintahan (negara), tetapi juga kepada komunitas moral yang dibentuk oleh kemanusiaan semua manusia. Hal ini karena sebagaimana yang diungkapkan oleh Nussbaum (Ide, 2018: 143-144) bahwa pada dasarnya komunitas moral lebih besar daripada komunitas nasional manapun.

Ketiga, ideologi internasionalisme. Menurut Byram (Isaacs, 2018: 151) internasionalisme dapat dipahami sebagai ikatan internasional masyarakat dunia yang mengesampingkan negara bagian, bangsa, dan kelompok orang. Internasionalisme memiliki orientasi pemikiran atau pandangan untuk mengatasi batas-batas negara-bangsa dan menghindari kesetiaan buta pada satu negara bangsa. Hal ini untuk menghilangkan egoisme, prasangka, dan kemelekan nasionalis kaum muda. Kaum muda diberikan persiapan mental melalui pendidikan bagi

kewarganegaraan global untuk hidup dalam komunitas internasional dan ekonomi global. Terdapat tiga implikasi pandangan internasionalisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global, yaitu konsep globalisasi, interkoneksi global, dan kewarganegaraan lintas budaya. Berikut uraian implikasi tersebut; konsep globalisasi membuka perdebatan tentang teori sistem dunia (koneksi terjadi melalui perkembangan terus menerus dan pertukaran barang, ide, uang, manusia dan media); interkoneksi global menciptakan imajinasi sosial yang lebih luas dengan memberikan subjektivitas melalui pilihan pribadi yang lebih besar, masuk ke komunitas warga global; kewarganegaraan lintas budaya mendorong komunikasi/dialog di antara kelompok-kelompok dengan bahasa dan budaya yang berbeda di dalam, dan melintasi batas negara-bangsa. Dalam konseptualisasi ini masyarakat global dipandang terdiri dari umat manusia secara keseluruhan dan tidak dianggap secara eksklusif dalam konteks kelompok sosial yang lebih kecil seperti negara.

Internasionalisme mempromosikan program kewarganegaraan lintas budaya dan koneksi global (imajinasi sosial global yang luas, dan perluasan batas negara bangsa). Berikut beberapa aspek interkoneksi yang dapat terbangun dalam hubungan antar isu-isu lokal, nasional, dan global; 1) Ketersediaan sumber daya, lapangan kerja, kelangkaan pangan, kelangkaan air; 2) Hak dan kewajiban; 3) Pemerintah yang baik; 4) Kejutan, pencari suaka, pekerja anak, tentara anak; 5) Penyakit (HIV/AIDS, Ebola); 6) Konflik, genosida, kekerasan perang; 7) Kesenjangan ekonomi, kemiskinan global; 8) Masyarakat sipil, masyarakat korporasi, masyarakat religius, LSM, korporasi multinasional, pemuda, negara; 9) Keanekaragaman hayati, perubahan iklim, manajemen bencana, dan risiko, keadaan darurat lingkungan; 10) Geografi kritis, sejarah kritis, literasi kritis, literasi media kritis, warisan perbudakan dan warisan kolonialisme (Isaacs, 2018: 162).

Keempat, ideologi transnasionalisme. Studi ideologi transnasionalisme dalam ilmu sosial pada dasarnya bidang penelitian baru, sehingga kurang berteori, meskipun bukan sebuah fenomena baru. Transnasionalisme muncul dari pengalaman migran sebagai inti mobilitas global. Transnasionalisme memungkinkan cara berpikir baru tentang hubungan antara kewarganegaraan global dan migrasi. Implikasi pandangan transnasionalisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global ialah merumuskan konsep kewarganegaraan yang tidak lagi dibatasi oleh batas-batas identitas nasional atau afiliasi politik. Transnasionalisme adalah konsep yang berfokus pada praktik dan jaringan lintas batas. Melalui transnasionalisme meningkatkan kapasitas pendidikan untuk membayangkan bentuk-bentuk baru identitas,

kebangsaan dan kewarganegaraan. Perhatian utamanya berupa promosi untuk mendorong perkembangan nilai-nilai perdamaian, toleransi, saling pengertian, dan mengembangkan kapasitas untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan (Soong, 2018: 173).

Kelima, ideologi kosmopolitanisme. Gagasan inti dari paham kosmopolitanisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global adalah di mana rasa kemanusiaan dan rasa saling menghormati dapat terjadi di antara orang yang berbeda, terlepas dari kelas, ras, jenis kelamin, dan kepercayaan. Kosmopolitanisme menyajikan sosialisasi kehidupan yang sesuai dengan munculnya tatanan kebebasan, keramahan, toleransi, dan hak-hak kewarganegaraan tanpa batas. Dalam banyak studi kewarganegaraan, kosmopolitanisme dianggap sebagai keterbukaan diri terhadap budaya dan gaya hidup lain, kesiapan untuk berhubungan dengan orang lain dan untuk belajar tentang atau dari mereka, dan kehati-hatian tentang bagaimana diri berbicara tentang orang lain (Papastephanou, 2018: 180).

Keenam, ideologi post-kolonialisme. Esensi dari paham post-kolonialisme adalah mengajak untuk menghidupkan kembali dan melindungi kehidupan-kehidupan yang secara historis telah ditundukkan oleh kekerasan kolonial. Dalam pandangan post-kolonialisme pendidikan dan kewarganegaraan global sebagai salah satu dekolonisasi, termasuk memberikan analisis kritis tentang bagaimana ketidaksetaraan muncul. Seseorang yang telah dididik menjadi kewarganegaraan global harus mau dan siap untuk berbicara menentang bentuk-bentuk ketidakadilan sosial (Davids, 2018: 197). Kewarganegaraan global hendaknya tidak hanya memiliki perasaan tentang perannya sebagai warga dunia, dan menghargai keanekaragaman, tetapi sebagai warga negara yang juga “marah” karena ketidakadilan sosial. Inilah implikasi pandangan post-kolonialisme terhadap pemaknaan kewarganegaraan global.

Ketujuh, ideologi indigenitas. Pandangan pendukung ideologi indigenitas memandang bahwa isu kemunculan kewarganegaraan global akan berpotensi membuat pengetahuan lokal terancam. Namun, ideologi ini mendukung pendidikan untuk kewarganegaraan global apabila melegitimasi pengetahuan lokal. Menurut pandangan ideologi indigenitas caranya adalah dengan perluasan praktik-praktik lokal yaitu dengan merumuskan agenda kewarganegaraan global dalam konteks studi kewarganegaraan yang relevan dan bertanggungjawab (Higgs, 2018: 220).

Kewarganegaraan Global dalam Konteks Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan saat ini tidak akan relevan jika tidak membahas praktik kewarganegaraan yang merespons

realitas baru (Manisha, 2018: 543). Dalam konteks masyarakat dan budaya global yang semakin beragam, maka ditekankan perlunya kewarganegaraan yang berorientasi global. Pendidikan Kewarganegaraan Global dapat diartikan sebagai “pendidikan baru” untuk pendidikan kewarganegaraan (PKn) di era global. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Titus (1999) bahwa perlu ada pendekatan baru dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan baru ini disebut oleh Charles Titus sebagai *civic education* untuk pemahaman global, yaitu sebagai cara pandang baru dalam pendidikan kewarganegaraan. Hal yang senada diungkapkan oleh Banks (2008: 135) bahwa perlu konsepsi ulang mengenai pendidikan kewarganegaraan di era global abad ke-21, agar mampu mencetak dan mendidik siswa secara efektif menjadi warga negara yang dapat berperan dan menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Pike (Franch, 2019: 4) juga berpandangan bahwa kewarganegaraan global adalah perspektif baru PKn. Sudah saatnya memahami kewarganegaraan yang bercita-cita dan bermanfaat untuk dunia/global. Namun tidak berarti mengakhiri kewarganegaraan nasional. Pertanyaannya, bagaimana kewarganegaraan global dalam konteks PKn?

Merujuk pendapat Curuana (2014: 85) bahwa dalam pendidikan, PKn dapat memperluas kewarganegaraan global sebagai konsep dengan memasukkan keragaman, rasa memiliki, komunitas dan solidaritas, serta mengembangkan pedagogi yaitu ruang belajar, pembelajaran dan pengajaran global. Berdasarkan tiga dokumen utama UNESCO tentang konten dan pedagogi pendidikan untuk kewarganegaraan global, yaitu GEFI 2012, UNESCO 2014, dan UNESCO 2015, menurut Toukan (2018: 64) konstruksi kewarganegaraan global dalam konteks pendidikan dapat dikembangkan dengan tiga konseptual inti yaitu global, kewarganegaraan, dan pendidikan. Lebih lanjut Toukan (2018: 64) mengidentifikasi ketiga tema tersebut, yang mana tema global mencakup (1) komunitas global (global sebagai komunitas keluarga); (2) masalah global (peristiwa, sistem, struktur); (3) global sebagai situs untuk perdamaian atau konflik (perdamaian sebagai tujuan pendidikan kewarganegaraan global). Adapun tema kewarganegaraan mencakup (1) sikap; (2) nilai-nilai dan kepercayaan; (3) berpikir kritis (pengetahuan dan pemahaman kewarganegaraan); (4) partisipasi, keterlibatan, dan tindakan. Sedangkan tema pendidikan meliputi dua tema penting yaitu pendekatan implementasi, dan pedoman dalam pengajaran dan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi warga global. Kewarganegaraan global pada hakikatnya berorientasi untuk memperluas kedekatan dan jaringan sosial siswa, sekaligus siswa dapat berpikir secara kritis berkaitan

dengan isu dan permasalahan lokal, nasional, dan global yang berhubungan erat dengan setiap kehidupan manusia (Mansouri, Johns, dan Marotta, 2017: 2).

Kewarganegaraan global dalam konteks PKn bersifat transformatif. Artinya, memberikan kesempatan dan kompetensi kepada siswa untuk mengaktualisasikan hak dan kewajibannya dalam mempromosikan masa depan dunia yang lebih baik. Menurut Sarabhai (2013: 137) kewarganegaraan global dalam konteks PKn menjadi pendorong utama perubahan menuju kelestarian lingkungan, kehidupan berkelanjutan, kesetaraan gender, peluang ekonomi, kesehatan, dan menanamkan rasa menjadi warga global yang baik dan bertanggungjawab. Dalam kewarganegaraan global, individu-individu tidak terlalu membatasi diri pada wilayah atau zona tertentu, namun sebaliknya memperluas kedekatan di luar dari batas-batas wilayah nasional untuk berpikir secara kritis dan etis, serta mampu menempatkan diri dalam konteks lokal, nasional, dan global (Mansouri, Johns, dan Marotta, 2017: 2-3). Hal ini karena dalam kewarganegaraan global dibutuhkan pengakuan dan kesetaraan, khususnya terhadap kelompok rentan sebagai upaya menumbuhkan konsep dan praktik kewarganegaraan global yang mampu mengatasi ketidakadilan sosial.

Studi Ho (2018: 88) secara umum menunjukkan bahwa tampak minat yang meningkat pada isu kewarganegaraan global dalam kurikulum sekolah di Asia Timur dan Tenggara. Meskipun masih dengan fokus nasionalistik yang kuat, namun tren umum dari negara-negara Asia Timur dan Tenggara telah memberikan perhatian lebih besar pada gagasan dan konsep yang terkait dengan kewarganegaraan global. Dua diskursus yang kuat teridentifikasi yaitu: (1) pendidikan hak asasi manusia; dan (2) daya saing global dan kebanggaan nasional. Negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang telah mengintegrasikan kajian kewarganegaraan global ke dalam PKn di antaranya Hong Kong, China, Korea Selatan, Malaysia, dan Indonesia.

Di Hongkong, sejak reformasi pendidikan tahun 2000-an telah mulai memuat tema kewarganegaraan global. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Chong (2015: 221) bahwa Pendidikan untuk kewarganegaraan global telah berkembang di Hong Kong, yang mana sedari awal hanya bermula dari sikap keprihatinan yang paling sederhana tentang dunia, kini telah mencakup kewajiban moral dan bermuara pada pengambilan tindakan untuk global/dunia. PKn di Hong Kong secara bersama-sama dengan mata pelajaran yang berbeda seperti Humaniora, Sejarah, Studi Liberal mengajarkan anak-anak sekolah tentang dunia dan menekankan isu hak asasi manusia, yakni bagaimana siswa harus memperhatikan masalah marjinalisasi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Siswa juga diajari bahwa mereka memiliki kewajiban untuk semua umat

manusia, di antaranya kewajiban untuk menentang ketidakadilan (Ho, 2018: 89). Tema khas mata pelajaran PKn untuk kewarganegaraan global di Hong Kong meliputi: memahami interaksi dalam masyarakat dan lingkungan manusia; membentuk masa depan yang disukai; eksplorasi perubahan; kesaling-tergantungan; identitas dan keberagaman; hak dan tanggung jawab; membangun perdamaian; kemiskinan dan kekayaan; keberlanjutan dan keadilan global; mengembangkan keterampilan kerjasama; tanggung jawab bersama; berpikir kritis; dan komunikasi (Chong, 2015: 221). Dengan demikian, kurikulum PKn Hong Kong untuk kewarganegaraan global mencakup konsep-konsep seperti saling ketergantungan, masyarakat kosmopolitan, dekolonisasi, etika global, dan persatuan global. PKn untuk kewarganegaraan global di Hong Kong diharapkan dapat membentuk dan mengembangkan pemahaman serta komitmen siswa berkaitan dengan kewajiban kewarganegaraan global.

Sementara China secara bertahap telah berorientasi pada pengembangan perspektif global dan mempersiapkan China untuk menjadi anggota yang lebih terintegrasi dengan dunia global. Perspektif global ini terdiri dari beberapa elemen termasuk menjadi warga yang memiliki kesadaran global (misalnya, pemahaman saling ketergantungan, pembangunan damai), pengetahuan global (misalnya, masalah internasional saat ini), keterampilan dan nilai-nilai global (misalnya, hak asasi manusia), dan perilaku global (berpartisipasi dalam kegiatan yang mempromosikan keadilan global) (Ho, 2018: 88). Demikian juga di Korea Selatan, pendidikan kewarganegaraan Korea Selatan telah bergeser dari mempromosikan warga negara yang loyal pada negara-bangsa menjadi gagasan tentang warga negara yang bertumpu pada hak asasi manusia, berpikiran global, dan kosmopolitan dengan rasa tanggung jawab kolektif sebagai anggota dari kemanusiaan yang sama.

Adapun Malaysia dalam silabus Pendidikan Moral yang telah direvisi pada tahun 2000 memberikan perhatian lebih pada tujuan visi 2020. Visi 2020 tersebut adalah pembangunan komunitas global yang bertujuan untuk mengembangkan individu yang bertanggung jawab dengan standar moral yang tinggi dan mampu berkontribusi pada perdamaian dan keharmonisan masyarakat, negara dan komunitas global. Di Malaysia, dari tujuh area pembelajaran dalam silabus Pendidikan Moral 2000 untuk sekolah menengah, satu area pembelajaran didedikasikan untuk hak asasi manusia, termasuk perlindungan hak-hak anak, penghormatan terhadap hak-hak wanita, perlindungan hak-hak pekerja, penghormatan terhadap hak-hak penyandang cacat, dan perlindungan hak-hak konsumen (Ho, 2018: 89).

Lalu bagaimana kajian kewarganegaraan global dalam konteks PKn di Indonesia? Di Indonesia, khususnya dalam kurikulum 2006 dan kurikulum 2013 secara eksplisit telah mencakup topik-topik seperti hak asasi manusia, globalisasi, perjanjian internasional, serta peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dokumen kurikulum 2004-2013 pada hakikatnya telah memuat standar-standar seperti: menjelaskan perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mengidentifikasi berbagai instrumen internasional hak asasi manusia, dan memahami lembaga internasional perlindungan hak asasi manusia dan peranannya (Ho, 2018: 89).

Berdasarkan studi beberapa lintas negara di atas, maka secara keseluruhan kewarganegaraan global telah menjadi daya tarik yang kuat dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, khususnya topik atau tema tentang Hak Asasi Manusia. Akan tetapi, meskipun peminatan terhadap kewarganegaraan global telah memunculkan atensi yang kuat dari berbagai negara, namun terdapat beberapa kritik atas gagasan kewarganegaraan global dalam konteks pendidikan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Manisha (2018: 539) yaitu; pertama, sejauh ini dunia belum berhasil dengan lembaga pemerintahan global. Tanpa institusi semacam ini kewarganegaraan global tidak dapat dikelola; kedua, interpretasi dan praktik etika sensitif terhadap budaya dan karenanya tidak mungkin untuk memiliki etika global yang seragam; ketiga, ikatan primordial masih kuat, begitupun identitas nasional dari suatu negara; keempat, warga global ibarat nomaden yaitu tidak menentu tanpa ikatan lokal, minat, maupun pengaruh, sehingga karenanya tidak benar-benar efektif sebagai warga negara. Hal yang sama diungkapkan oleh William (2016: 56) dalam kajiannya tentang kewarganegaraan global bahwa hambatan utama menerapkan pendidikan untuk kewarganegaraan global dalam konteks PKn adalah ketergantungan terus-menerus negara-bangsa pada hubungan yang kuat antara identitas nasional dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah, serta potensi disonansi antara kepentingan nasional dan komitmen kosmopolitan dalam menciptakan siswa yang siap menghadapi isu-isu kebijakan global. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa konsepsi kewarganegaraan global pada hakikatnya sangat diminanti namun sekaligus kontroversi, yaitu masih diperdebatkan, diperebutkan, dan memiliki sejumlah kritik akademis

PENUTUP

Simpulan

Pemaknaan terhadap konsep kewarganegaraan global dalam era kontemporer dewasa ini masih kabur dan belum terdapat definisi tetap yang telah disepakati. Faktor penyebabnya adalah karena perbedaan pandangan dari

para ilmun-ilmuan pendidikan (moralitas) dan sosial-politik yang masing-masing mengklaim kewarganegaraan global sebagai bagian kajian bidangnya. Dalam konteks saat ini konsep kewarganegaraan global dapat dipahami sebagai kewarganegaraan yang berpikiran/berorientasi global untuk ikut andil dan berperan aktif baik pada tingkat nasional maupun global dalam menghadapi dan menjawab berbagai tantangan dan permasalahan global, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, masalah lingkungan, dan masalah-masalah kemanusiaan lainnya, harapannya dapat membentuk warga global sebagai agen yang berkontribusi untuk menciptakan dunia yang damai, aman, adil, toleran, inklusif, dan berkelanjutan.

Beberapa ideologi yang berkembang dalam kajian akademis internasional mempengaruhi makna konsep maupun keberadaan kewarganegaraan global dalam kehidupan masyarakat dunia. Ideologi-ideologi tersebut adalah globalisme, nasionalisme, internasionalisme, transnasionalisme, kosmopolitanisme pasca-kolonialisme, dan indigenisme. Setiap ideologi-ideologi mempengaruhi makna dan keberadaan kewarganegaraan global sesuai dengan pendekatan dan penekanan masing-masing pemikiran dan kajiannya. Kajian kewarganegaraan global dalam konteks PKn secara eksplisit mencakup topik-topik seperti hak asasi manusia, globalisasi, dan perdamaian dunia. Berdasarkan studi beberapa lintas negara di atas, maka secara keseluruhan kewarganegaraan global telah menjadi daya tarik yang kuat dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia Timur dan Tenggara, khususnya topik atau tema tentang Hak Asasi Manusia.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dibahas dapat dipahami bahwa topik kewarganegaraan global merupakan salah satu kajian perkembangan mutakhir dan isu global PKn di abad 21. Oleh karena itu, kewarganegaraan global dapat digunakan sebagai pendekatan baru dalam studi pendidikan kewarganegaraan di abad 21 dalam rangka mencetak dan mendidik siswa secara efektif menjadi warga negara yang dapat berperan dan menjalankan tanggungjawabnya dengan baik di kancah nasional maupun global.

DAFTAR PUSTAKA

- Ampuja, M. 2016. Globalization theory, media-centrism and neoliberalism: A critique of recent intellectual trends. *Critical Sociology*, 38(2), 281-301.
- Banks, J. A. 2008. Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129-139.

- Beiner, R. 1995. *Theorizing citizenship*. New York: State University of New York Press, Albany.
- Chong, E.K.M. 2015. Global citizenship education and Hong Kong's secondary school curriculum guidelines: From learning about rights and understanding responsibility to challenging inequality. *Asian Education and Development Studies*. 4(2): 221-247.
- Cotton, D. R. E., Morrison, D., Magne, P., Payne, S., & Heffernan, T. 2019. Global Citizenship and cross-cultural competency: Student and expert understandings of internationalization terminology. *Journal of Studies in International Education*, 23(3), 346–364. <https://doi.org/10.1177/1028315318789337>
- Curuana, V. 2014. Re-thinking global citizenship in higher education: From cosmopolitanism and international mobility to cosmopolitanism, resilience and resilient thinking. *Higher Education Quarterly*, 68(1), 85–104.
- Davids, N. 2018. Global citizenship education, postcolonial identities, and a moral imagination. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 193-208). London: Palgrave Macmillan.
- Franch, S. 2019. Global citizenship education between qualification, socialization, and subjectification. In Peterson et al., *The Palgrave Handbook of Citizenship and Education* (hlm. 1–15). London: Palgrave Macmillan.
- Gough, A. 2018. Sustainable development and global citizenship education: Challenging imperatives. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 295-314). London: Palgrave Macmillan.
- Giddens, A. 1999. *Runaway world: How globalisation is reshaping our lives*. London: Profile Books.
- Higgs, P. 2018. Indigeneity and global citizenship education: A critical epistemological reflection. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 209-225). London: Palgrave Macmillan.
- Ho, L. 2018. Conceptions of global citizenship education in East and Southeast Asia. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 83-96). London: Palgrave Macmillan.
- Ide, K. 2018. Living together with national border lines and nationalism. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 133-148). London: Palgrave Macmillan.
- Isaacs, T. I. 2018. Internationalism in global citizenship and educations. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 149-164). London: Palgrave Macmillan.
- Kennedy, K. J. 2012. Global trends in civic and citizenship education: What are the Lessons for Nation States?. *Education Sciences Journal*. 2, 121-135.
- Kymlicka, W. 2002. *Kewargaan multikultural*. (Terjemahan Edlina Hafmini Eddin). Jakarta: LP3ES.
- Manisha, P. 2018. Social media and youth: Implications for global citizenship education. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 539-556). London: Palgrave Macmillan.
- Mansouri, F., Johns, A., dan Marotta, V. 2017. Critical global citizenship: Contextualising citizenship and globalisation. *Journal of Citizenship and Globalisation Studie*. 1(1): 1-9.
- Misco, T. 2018. Morality. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 363-376). London: Palgrave Macmillan.
- Murdiono, M. 2018. *Pendidikan kewarganegaraan global: Membangun kompetensi global warga negara muda*. Yogyakarta: Uny Press.
- Papastephanou, M. 2018. Why cosmopolitanism needs rethinking. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 179-192). London: Palgrave Macmillan.
- Pike, G., & Sillem, M. 2018. Study abroad and global citizenship: Paradoxes and possibilities. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 573-588). London: Palgrave Macmillan.
- Ross, A., & Davies, I. 2018. Europe and global citizenship. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 21-36). London: Palgrave Macmillan.
- Sarabhai, K.V. 2013. ESD and global citizenship education. *Journal of Education for Sustainable Development*. 7(2): 137-139.
- Schreiber-Barsch, S. 2018. Global citizenship education and globalism. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 113-132). London: Palgrave Macmillan.
- Shultz, L. 2018. Global citizenship and equity: Cracking the code and finding decolonial possibility. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 245-256). London: Palgrave Macmillan.
- Soong, H. 2018. Transnationalism in education: Theoretical discussions and the implications for teaching global citizenship education. In I. Davies et al., *The Palgrave Handbook of Global Citizenship and Education* (pp. 165-178). London: Palgrave Macmillan.
- Sukmayadi, T. 2022. Globalisasi dan kewarganegaraan. Dalam D. Budimansyah (Ed.), Arpanudin, I., Kusnadi., Arif, D, B., Mulyono, B., Alrakman R., Tarsidi, D, Z., Wantoro, T., Iswandi, D., dan Rawanoko, E. S., *Studi kewarganegaraan: Konsep, teori, dan kerangka psiko-pedagogik* (hlm. 69-92). Bandung: Jendela Hasanah.
- Theresa, A.M. 2015. A good citizen is what you'll be: Educating Khmer youth for citizenship in a United States migrant education program. *Journal of Science Education*. 14(3), 66-74.

- Titus, C. 1999. *Civic Education for global understanding*. London: Eric Digests.
- Toukan, E.V.D. 2018. Educating citizen of 'the global: Mapping textual constructs of UNESCO's global citizenship education 2012-2015.'" *Education, Citizenship, and Social Justice*. 13(1) 51-64.
- Usmi, R., & Samsuri. 2022. Urgensi pendidikan kewarganegaraan global dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Abad 21. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(1), 149-160.
- UNESCO. 2015. *Global citizenship education: Topic and learning objectives*. France: UNESCO.
- William, R. F. 2016. Global citizenship education and human rights education: Are they compatible with U. S. civic education?. *Journal of International Social Studies*. 6(2): 34-57